Upaya Diplomasi Indonesia Untuk Mencegah Gerakan Separatis *United Liberation Movement For West Papua (Ulmwp)* Bergabung Dengan *Melanesian Spearhead Group (MSG) (2014-2017)*

Rujutimnat S. Momou

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas computer Indonesia
email. jutimomou@gmail.com

ABSTRAK - Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mencegah gerakan separatis *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* begabung dengan *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Melanesian Spearhead Group adalah forum negara-negara di wilayah Pasifik Selatan yang memiliki ras Melanesia.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) merupakan kelompok separatis yang berada di wilayah Papua dengan segala cara ingin menjadi anggota tetap karena saat ini statusnya *associate member* dalam forum *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Gerakan yang dilakukan merupakan bagian dari *resistensi* mengenai integrasi dan status politik, kekerasan HAM, pembangunan di Papua dan marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua.

Indonesia mencoba untuk mencegah meningkatnya pergerakan kelompok Papua merdeka sebagai bagian dari *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Melalui langkah startegis di dalam *Melanesian Spearhead Group (MSG.)* kajian ini mencoba menganalisa upaya-upaya diplomasi apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam forum MSG agar kelompok Papua merdeka tidak di akui keanggotaannya dalam dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui konsep Politik Luar Negeri dengan model diplomasi bahwa alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa di ambil oleh pemerintah dalam memperhitungkan untung dan rugi atas masing-masing alternatif tersebut.

Kata kunci : Indonesia, Diplomasi, ULMWP, MSG dan HAM

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Isu gerakan separatis di Papua merupakan isu yang perlu diperhatikan oleh suatu Negara, kasus Papua ibarat bom waktu bagi Indonesia. Banyak faktor yang mampu memicu isu Papua menjadi isu besar dan terbuka, yakni politik, keamanan, sosial, dan ekonomi. Dimensi persoalan Papua yang sangat beragam, baik itu nasional, dan internasional yang berpotensi kuat mengubah masalah yang bersifat nasional menjadi Internasional.

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap sebagai permasalahan internal

kini telah memasuki kategori eksternal setelah berbagai Negara dan kelompok dari luar negeri turut campur tangan, baik dalam mendukung kelompok yang mengatas namakan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* secara langsung menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis Papua.

Pergerakan gerakan separatis ULMWP telah meluas ke daerah lain di Indonesia bahkan di luar negeri. Pergerakan diberbagai daerah di Indonesia dilakukan beberapa mahasiswa asli Papua yang merupakan simpatisan OPM yang menginginkan kemerdekaan. Aksi-aksi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi referendum yang dicita-citakan. Sebagai contoh, di Yogyakarta sering terjadi aksi protes terhadap pemerintah dan tuntutan demi kemerdekaan Papua. Aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi adalah aksi yang paling sering dilakukan, seperti pada aksi terakhirnya pada bulan Februari 2015. Aksi semacam ini tidak jarang menimbulkan kekacauan dibeberapa daerah tersebut dan tidak hanya terjadi sekali (https://www.rappler.com/indonesia/140922-mahasiswa-papua-yogyakarta-dicap-separatis_diakses 28 Agustus 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara besar. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat multi ethnis berpotensi besar menimbulkan ancaman disintegrasi di Republik ini. Konflik - konflik yang selama ini tersembunyi mencuat ke atas permukaan. Berbagai gerakan separatis bermunculan dan mulai mengancam untuk berpisah dari NKRI, salah satunya gerakan separatis OPM yang saat ini menjadi *United Liberation for West Papua (ULMWP)*.

Masalah nasional yang di timbulkan oleh wilayah yang dulunya disebut Nugini Belanda. Dan permasalahan yang lebih kompleks lebih dirasakan oleh Indonesia dimana proses transisi perubahan sejak runtuhnya rezim Soeharto yang otoriter di indonesia menjadi sorotan dunia internasional karena berbagai bentuk konflik yang mengalami eskalasi secara signifikan. Bentuk-bentuk konflik internal tersebut mencakup gerakan separatis yang muncul dengan memanfaatkan sentimen etnis, agama maupun ketidakadilan bisa timbul kapan pun di republik ini, salah satunya adalah Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).*

Masalah yang disebabkan oleh OPM atau saat ini bertransformasi menjadi ULMWP merupakan satu contoh dari gerakan separatisme dimana isu HAM merupakan bagian integral dari gerakan tersebut. Konflik antara Indonesia yang gerakan sebenarnya telah dimulai semenjak Papua dikalim menjadi bagian dari NKRI, hanya saja mulai semakin menarik semenjak runtuhnya kekuasaan Soeharto. Ada berbagai faktor yang menjadi alasan mengapa konflik tersebut bisa terjadi. Selain faktor politik, ekonomi, dan juga ideologi, adanya dendam lama terhadap tindakan politik dan militer yang dilakukan oleh pemerintah indonesia menjadi alasan dasar Organisasi Papua Merdekan (OPM) untuk bangkit melawan.

Misalnya, Gerakan separatis Organisi Papua Merdeka (OPM) bermula pada saat

peristiwa yang berlangsung pada tanggal 6 juli 1965 terjadi serangan terhadap TNI dari batalion 751 Brawijaya yang menewaskan tiga orang anggota TNI. wilayah yang menclaim bukan bagian dari NKRI yang akibatnya semakin memperparah kemiskinan negara–negara tersebut dikarenakan hancurnya basis-basis ekonomi yang pada dasarnya memang telah rapuh dan akhirnya menimbulkan pernderitaan berkepanjangan terhadap negara tersebut.

Gerakan Perlawanan Rakyat Papua mulai dari Jayapura tahun 1963 dibawah pimpinan Aser Demotokay hingga yang paling parah di Kebar tanggal 26 Juli 1965 dibawah Pimpinan Yohanes Jambuani dan Benyamin Anari serta di Arfai 28 Juli 1965 yang dibawah pimpinan Permenas Fery Awom. Operasi Tumpas dilakukan agar bisa menumpas semua gerakan masyarakat Pribumi Papua yang menantang Indonesia sebelum diadakannya Referendum (PEPERA) pada tahun 1969. (http://oppb.webs.com/apps/blog/show/1624869-analisis-penyebab-konflik papua_ Diakses 28 Agustus 2017)

Tujuan didirikannya *West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)* untuk menghimpun kembali para pemimpin organisasi sayap politik pasca KRP II. KNPB dibentuk untuk menjadi media penyalur aspirasi masyarakat Papua di luar negeri. KNPB pun menjadi cikal bakal berdirinya *Parlemen National West Papua (PNWP)* memiliki basis KNPB di seluruh tanah Papua. Beberapa organisasi politik tersebut di antaranya mendaftarkan *West Papua* untuk menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group (MSG)* pada 2013 di Kanaky, New Caledonia. Dalam MSG Leader Summit dua tahunan itu, aplikasi keanggotaan *West Papua* disarankan agar menjadi satu karena beberapa organ itu membawa nama *West Papua*.

Pada 2014 ketiga organ politik NFRPB, PNWP, dan WPNCL menyatukan diri dalam satu pergerakan dan perjuangan di bawah payung besar *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* di Saralana, Port Vila, Vanuatu. Lalu *ULMWP* mengajukan aplikasi keanggotaan *West Papua* pada pertemuan dua tahunan *MSG* Leader Summit pada Juni 2015 di Honiara, Solomon Islands. Dan aplikasi *ULMWP* pun diterima sebagai anggota pengamat atau observer member. Para pimpinan *MSG* menjanjikan *ULMWP* akan diterima sebagai anggota penuh pada Juli 2016, namun dinamika politik tampaknya mengulur janji itu tergenapi. (http://honaicenter.org/2016/08/ulmwp-meniti-jalan-keselamatan-di-pasifik/_Diakses 29 Agustus 2017)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah mayor, yaitu untuk mengetahui "Sejauh mana upaya Diplomasi yang dilakukan Pemerintah RI untuk mencegah gerakan separatis *United Libertion Movement for West Papua (ULMWP)* bergabung dengan *Melanesian Spearhead Group (MSG)?*

Kemudian rumusan masalah mayor di turunkan dalam rumusan masalah minor, dimana dalam menilai Pemerintah dalam suatu negara dalam menjaga keutuhan negara dalam mencapai tujuannya

1. Upaya – upaya diplomasi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dalam mencegah gerakan separatis ULMWP untuk bergabung dengan MSG?

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dalam dalam melakukan Diplomasi untuk mencegah gerakan separatis ULMWP untuk bergabung dengan MSG?
3. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota Melanesian *Melanesian Spearhead Group (MSG)?*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah adalah :

1. Diharapakan dapat mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah gerakan separatis ULMWP bergabung dengan MSG?
2. Untuk mengetahui, meneliti dan memahami kendala serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah gerakan separatis ULMWP bergabung dengan MSG?
3. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana hubungan Indonesia dengan Negara-negara anggota MSG.

1.4 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dan sebagai bahan masukan untuk pemerintah Indonesia untuk dapat mencegah bergabungnya gerakan separatisme dalam forum Melanesian Spearhead Group dan diharapkan juga dapat berguna untuk menguji konsep yang dipergunakan terkait dengan mata kuliah, Organisasi Internasional, Diplomasi HI di Australia - Pasifik dan Ham dan Demokrasi dalam menjelaskan berbagai fenomena terkait dengan peran pemerintah dalam menjaga keutuhan negaranya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Hubungan Internasional

Hubugan internasional merupakan suatu hubungan yang melintasi batas suatu negara yang mana segala bentuk interaksi mencakup hubungan luar negeri antar negara suatu dengan negara yang lain, maka Kusumowidjojo dalam Sitepu menjelaskan bahwa hubungan internasional secara harfia, sebagai suatu hubungan antar bangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hukum merupakan aspek yang dominan. Sebagai aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi dan kebudayaan) sedangkan aspek hukumnya menjadikannya aspek formal dalam artian merupakan bentuk atas penyelesaian prosedur dari berbagai kepentingan *(interest)* (Sitepu, 2011:20).

Bob Sugeng Hadiwinata Dalam bukunya Hermawan "*Transformasi dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional"* menyatakan bahwa dari sisi isu, pada awal kemunculan akhir abad ke-19 hubungan internasional lebih mefokuskan pada isu seputaran masalah peperangan dan perdamaian *(war and peace)*, maka pada perkembangan selanjutnya Hubungan Internasional lebih merambah ke persoalan yang menyakut kerjasama ekonomi

antar negara, upaya untuk memerangi kemiskinan global, memahami ketimpangan hubungan antar kelompok negara kaya dengan negara miskin, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar negara *(transnational crime)*, upaya untuk mengatasi konflik dan separatisme, dan sebagainya.

Kombinasi antara faktor perubahan struktur politik global, teknologi, dan globalisasi telah mengubah secara substansi kerakter masalah keamanan dan ekonomi global. Makin merebaknya konflik internal (separatisme, konflik etnis keagamaan, dan lain-lain) yang melibatkan kelompok militian, ekstrimis, chauvinis, mafia dan sebagainya telah membuat masalah peperangan dan perdamaian tidak lagi didominasi oleh negara (Hermawan, 2007:1).

2.2 Politik Luar Negeri

Negara dalam konteks ini dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan dan kekuasaan yang sifat otonom. Negara juga merupakan unit dasar dalam politik luar negeri dari berbagai negara yang pada gilirannya akan membentuk suatu pola perilaku. Pola perilakunya inilah yang mencerminkan koneksitasnya dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijaksanaan lur negerinya yang diartikulasikan oleh pemerintah denga segala konsekuensinya.

Ini adalah suatu proses pembuatan keputusan atau kebijakan luar negeri atau mengartikulasi kebijakan-kebijakan yang pada prisnsipnya dipengaruhi oleh suasana dalam negeri(domestik) dan suasana internasional dan kesemuannya ini diarahkan kepada tujuan atau sasaran politik luar negeri itu sendiri, didasarkan pada dua unsur utama. Dua unsur utama tersebut adalah:

a. Tujuan nasional *(natinal objektives);* dan
b. Sarana *(means)* untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan nasional atau lebih tepatnya dikatakan sebagai sarana politik luar negeri. Sedangkan yang berkaitan dengan sarana politik luar negeri adalah yang hubungannya dengan instrumen-intrumen atau melalui mana pelaksanaan politik luar negeri itu dilakukan. Dalam bagian ini diuraikan lebih lanjut mengani unsur politik luar negeri itu.

Politik luar negeri pada umumnya memiliki tujuan maupun sasaran yang hendak dicapai *(foreign policy objektive)* yang terkadang melebihi kepentigan nasionalnya. Dalam hal ini tergantung kepada si pembuat kebijakan atau keputusan politik luar negeri yang bersangkutan dan dalam hal ini, sering terjadi perbedaan-perbedaan, terutama didalam prespektif, orientasi dan peranan orientasi politik luar negerinya. Politik luar negeri adalah sebagaimana suatu citra keadaan negara masa depan dan kondisi masa depan yang pemerintah melalui pembuat kebijakan perorangan bercita-cita untuk membawa pengaruh pengaruh ke luar negeri dan dengan mengubah atau mempertahankan perilaku negara lain (Holstin, 1983: 4-5, 124).

2.3 Diplomasi

Diplomasi memiliki kaitan erat dengan politik luar negeri, karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luara negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi terlatih. Dibanyak negara, kebijakan luar negeri dirancang dan diformulasikan oleh dan

Staf Deplu. Pelaksanaan diplomasi bilateral dan ultilateral serta kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan-perwakilan yag ditempatkan di luar negeri dan didalam organisasi internasional.

Diplomasi merupakan praktek pelaksanaan hubungan antara negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanaannya. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dengan politik luar negeri, tetapi kedua-duannya merupakan kebijakan eksekutif untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik. Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mecapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang di ambilnya (Aelina, 2010:2-3).

Keberhasilan atau kegagalan diplomasi akan tergantung tidak hanya menajemen hubungan internasional yang dilaksanakan oleh para diplomat yang ditempatkan di luar negeri, tetapi juga tergantung pada arahan dari Menlu atau Direktur Jenderal. Cohen secara khusus mecatat bahwa pengaruh diplomasi terhadap kebijakan luar negeri di negar-negara yang berkembang yang menganut sistem pemerintahan yang terpusat, eksekutif pusat yang kuat, birokrasi yang relatif lemah dan dasar pembentukan kebijakan yang sempit. Kepala negara lebih senang melakukan negosiasi secara langsung atau melakukan diplomasi personal; dalam hal lingkungan dekat Presiden (emisaries) seringkal bukan berasal dari kalangan diplomatik, sering kali diutus untuk melakukan tugas-tugas diplomatik. Tidak adanya kegiatan pengambilan keputusan yang interaktif cenderung memperlemah peran birokrasi dan khusunya departemen Luar negeri (Warsini, 2012: 13-14).

2.4 Organisasi Internasional

Hubungan kerjasama antar Negara secara internasional dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya Hubungan diplomasi antar negara sebagai bentuk perjanjian internasional juga merupakan salah satu wujud dari terjadinya aktifitas kerjasama hubungan internasional. Selain itu, bentuk kerjasama internasional lainnya dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting dalam hubungan internasional selain Negara.

Organisasi Internasional merupakan konsep yang dibawah oleh prespektif liberalisme. Prespektif liberalisme, yamg memandang bahwa hakikat manusia adalah baik dan percaya bahwa perdamaian abadi *(perpetual peace)* dapat diwujudkan melalui kerjasama. Persepektif ini mengangap bahwa masalah didunia internasional dapat diatasi dengan membentuk suatu kerjasama dan dengan mendirikan organisasi intenasional (Hennida, 2015:7).

Teuku May Rudy juga dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional memaparkan pengertian Organisasi Internasional yaitu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan fungsinya secara berkesinamubungan dan melembaga guna

mengusahakan tercapainya tujuantujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2005:3).

2.5 Separatisme

Gerakan Separatis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius Gerakan Separatisme merupakan paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri) Separatisme selalu dipahami sebagai gerakan yang bersifat politis untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain) (Pour, 2008 : 4)."

Gerakan separatisme itu muncul akibat berbagai faktor, seperti faktor ideologi, ketidak adilan, kesejahtraan, kebijakan politik dan pengunaan kekerasan yang melangar HAM sehingga timbuk pergerakan untuk membebaskan dan memerdekakan diri. (Taluhelu, 2000:22)

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metodologi deksriptif analisis kualitatif. Bogda dan Taylor dalam melong mengemukakan bahwa metodologi kulitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Moleong, 2012:4).

Penelitian kualitatif dilakukan dengan kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif , peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas jadi dapat nertanya, meganalisis dan menkonstuksi obyek penelitian menjadi deskriptif mengambarkan secara spesifik suatu situasi, social setting, ataupun suatu hubungan. Melalui pendekatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang adanya upaya diplomasi yang di lakuan pemerintah indonesia terhadap negara-negara yang tergabung dalam forum etnis Melanesian.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif , peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas jadi dapat nertanya, meganalisis dan menkonstuksi obyek penelitian menjadi deskriptif mengambarkan secara spesifik suatu situasi, social setting, ataupun suatu hubungan. Melalui pendekatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang adanya upaya diplomasi yang di lakuan pemerintah indonesia terhadap negara-negara yang tergabung dalam forum etnis Melanesian.

4. Objek Penelitian

4.1 Sejarah dan Perkembangan *(MSG)*

Beberapa peristiwa penting mendahului pembentukan organisasi politik sub-regional *the Melanesian Spearhead Group*, antara lain pidato tentang sosialisme Melanesia yang disampaikan di Canberra pada tahun 1982 dan kemerdekaan Papua Nugini (1975), Solomon (1978), dan Vanuatu (1980).

Pembentukan awal *Melanesian Spearhead Group* terjadi pada sebuah pertemuan informal pada tahun 1986 namun mencerminkan sebuah manifestasi penting ideologi Melanesianisme dalam politik kawasan yang telah cukup lama berkembang. *Melanesian Spearhead Group* merupakan salah satu dari tiga kelompok sub-regional di kawasan kepulauan Pasifik, yang terdiri dari negara-negara Melanesia di Pasifik Barat, yang berdekatan dengan Australia, yaitu: Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan *Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS), gerakan pro-kemerdekaan dari Kaledonia Baru. Kehadiran kelompok politik seperti FLNKS bukanlah hal biasa dalam *Melanesian Spearhead Group* karena FLNKS mencerminkan akar sejarah dan politik *Melanesian Spearhead Group*, yaitu negara-negara Melanesia yang baru merdeka datang bersama-sama dalam semangat solidaritas etnis dan budaya dengan komitmen tegas untuk bekerja memastikan pembebasan saudara-saudara Kanaky mereka. Ini adalah salah satu pendorong utama dari penandatanganan *„The Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia"* pada tahun 1988.

Tujuan dibentuknya MSG yaitu untuk mengatasi berbagai persoalan keamanan maupun ekonomi yang saat ini semakin berkembang dan dekolonisasi terhadap Negara-negara atau kelompok dalam ras melanesia, sehingga Negara-negara Melanesia berinisiatif membentuk organisasi subregional sebagai jawaban atas kebutuhan *collective action*. Terbentuknya organisasi sub-regional *The Melanesian Spearhead Group* tahun 1988 adalah karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor tekanan eksternal dan faktor interdependensi regional.

Faktor pertama, yaitu tekanan eksternal yang dimaksudkan adalah berupa tekanan dari luar kawasan regional Melanesia yang dapat terlihat melalui adanya pembentukan dan perkembangan berbagai regionalisme ekonomi di berbagai kawasan. Hal tersebut menjadi pemicu sehingga adanya keinginan yang kuat atau faktor *diserable* yang kemudian menyebabkan negaranegara Melanesia membentuk organisasi sub-regional ini.

4.2 *Melanesian Spearhead Group (MSG)* Dengan *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)*

Gerakan separatisme yang tergabung dalam *United Liberation Movement of West Papua* (ULMWP) tengah berkembang di kawasan itu serta menggalang dukungan dari negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia mengingat ULMWP merupakan organisasi politik yang memiliki tujuan sama dengan FLNKS dalam hal sebagai gerakan pro-kemerdekaan dari negara asal. Indonesia perlu melakukan upaya untuk mengimbangi usaha penggalangan dukungan oleh ULMWP di sub kawasan Melanesia.

Dari hasil KTT MSG tersebut *Melanesian Spearhead Groups atau (MSG)* mengadakan pertemuan rutinnya yang biasa dilakukan 2 tahun sekali, yaitu diterimanya organisasi *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* dalam keanggotaan MSG dengan status *observer*. Pada organisasi regional MSG ini, ULMWP diterima sebagai anggota

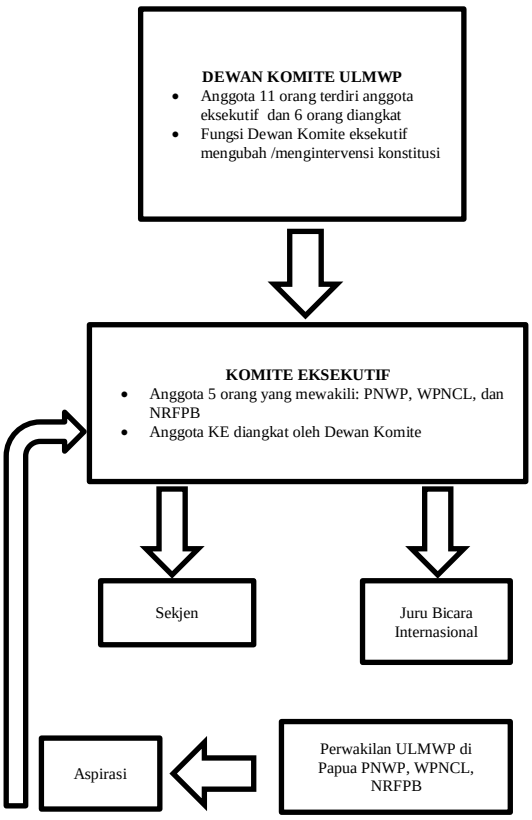
pengamat, dengan catatan sebagai wakil penduduk Indonesia yang tinggal di luar wilayah Indonesia dan bukan sebagai entitas negara tersendiri. Posisi baru itu jelas menimbulkan penafsiran yang rumit di dunia internasional, secara ULMWP hanya setingkat organisasi masyarakat di Papua bukan negara. ULMWP yang menjadi observer adalah bentuk dari lobi mereka kepada MSG, sehingga mereka dapat Posisi observer. Menjadi peninjau bisa diartikan keberadaan ULMWP telah diakui Melanesia.

Di Papua, hasil KTT MSG tersebut langsung disambut antusias oleh kelompok yang selama ini memperjuangkan peninjauan pepera 1969, yakni KNPB. Di Sekretariat KNPB Timika, langsung diadakan ibadah syukur dalam rangka menyikapi hasil keputusan KTT MSG tentang keanggotaan Papua Barat dalam forum MSG yang dikordinatori Yanto Awerkion. Namun, perlu diketahui alasan mengapa negara-negara yang bergabung di MSG tersebut menerima organisasi seperti ULMWP menjadi observer. Karena organisasi Papua Barat yang bernama ULMWP diberi status pengamat dalam KTT ini dan mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia. Kasus mereka berbeda dari FLNKS karena mereka berjuang dari luar, sehingga tidak mencerminkan kebenaran tentang situasi nyata.

Deklarasi tersebut menyatakan bahwa ULMWP memilki tujuan sebagai berikut

1. Mewakili Aspirasi Rakyat Papua Barat dalam perjuangan menentukan nasib sendiri dengan menggunakan cara damai.
2. Untuk mengkordinasikan tujuan memenangkan pembebasan Papua Barat di tingkat Internasional. Sebagai catatan, pendirian ULMWP tidak mengurangi peran ketiga organisasi pendiri tetapi melakukan kordinasi,
3. Menjaga kesatuan para pemimpin berbicara satu suara dengan mengakui keragaman pandangan dan kepribadian dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusi secara universal. Nilai-nilai demokrasi dan kepemimpinan insklusif, penghormatan terhadap perbedaan adat dan agama dijunjung tinggi dalam ULMWP.
4. Membangun dukungan meulai dari sub-regional, regional, hingga mengalang solidaritas internasional untuk mencari dukungan politik dan mendapatkan pengakuan.

Tujuan pertama ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh di MSG (Pamungkas, 2017:175-181)



5. Kesimpulan

Dalam mencegah gerakan separatis ULMWP bergabung dengan MSG menjadi anggota tetap dalam forum *Melanesian Spearhead Group* (MSG) Indonesia telah berupaya melakukan beberapa strategi diplomasinya dalam mengatasi permasalah yang di akibatkan oleh gerakan separatis di Indonesia yang dilakukan oleh badan pemerintah baik melalui diplomatik maupun cara lain untuk menarik simpati dari negara-negara anggota MSG, akan tetapi pada kenyataaanya sebagian besar yang dirasakan hanyalah sebatas kerjasama dalam pencapaian formalitas semata masih ada beberapa negara anggota MSG yang mendukung kelompok separatis ULMWP tersebut untuk menyuarakan isu-isu HAM yang selama ini diperjuangkan oleh kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Pembebasan Papua Barat dan membiarkan membuka kantor perwakilannya.

Dalam mencegah gerakan separatis memperoleh dukungan untuk bisa menjadi anggota tetap dalam forum MSG, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri dan diplomat-diplomat Indonesia yang merupakan aktor penting dalam penanganan masalah ini yang dimana berusaha menjalankan tugasnya untuk bisa menanggulangi bahkan menghilangkan prespektif-prespektif negatif Negara-negara pasifik selatan terlebih khususnya negara-negara anggota MSG terhadap Indonesia, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam membendung gerakan separatis menjadi salah satu jalan untuk membuka kerjasama. Melalui prorgam pengelolaan perbatasan dan kerjasama peningkatan kapasitas masing-masing negara, peningkatan kerjasama *capacity building* dengan negara-negara Pasifik Selatan yang diperoleh pada saat kunjungan delegasi Menlu RI pada ketiga negara tersebut, yaitu tata pemerintahan, kerja sama kelautan, kerja sama olah raga dan pemuda, kerjasama *ecotourism*, kerjasama lingkungan dan konservasi, dan kerjasama pendidikan / beasiswa.

Daftar Pustaka

Anwar, Dewi Fortuna. 2005. *Konflik Kekerasaan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor ____Indonesia.

Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London: University of

Aberdeen. Coplin, D. Wiliam. Dan Marcedes Marbun. 1992. *Pengantar Politik Internasional* : *Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.

Djelantik, Sukawarsini. 2012. *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Heninda, Citra. 2015. *Rezim & Organisasi Internasional*: *Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.

Holsti, K.J. 1983. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II,* Terjemahan

M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.

Holsti, K.J. 1987. *Politik Internasional*: *Suatu Kerangka Analisis*. Terjemahan Wawan Juanda. Bandung: Bina Cipta.

Djelantik, Sukawarsini. 2012. *Diplomasi Antara Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hermawan P. Yulius. 2007. *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor Isu dan Metodologi.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Jemadu, Aklesisus. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mas'oed, Mochtar. 1995. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3S. Jakarta.

Nuraeni, S. Deasy Silva dan Arfin Sudirman. 2010. *Regionalisme : Dalam Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Pour, Julius. 2008. *Dari Mengusir Kempetai Sampai Menumpas RMS.* Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Rusdiarti, Suma Riella dan Pamungkas Cahyo.2017. *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua*. Jakarta. ____Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Pour, Julius. 2008. *Ign. Slamet Riyadi : Dari Mengusir Kempeitai Sampai Menumpas RMS*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Roy, S.L. 1995. *Diplomasi*. Jakarta: PT. Grafindo Raja Perkasa.

Rudy, Teuku May. 1992. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional.* Bandung: Angkasa.

Rudy, Teuku May. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung. PT Refika Aditama.

Sitepu, P Antonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surya Aelina. 2010. *Praktik Diplomasi Terpilih Pada Masa Perang Dingin*:

Upaya- Upaya Mencegah Perluasan politik dan Mewujudkan Perdamaian ____Dunia. Bandung PT. Kibar Internasional.

Suryokusumo, Sumaryo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta. PT. Tatanusa.

Volker Rittberger & Benard Zangi. 2006. *International Organization: Polity, Politics, and Policies.* New York. Palgrave Macmillan.

Widjojo, S Muridan. 2009. *Papua Road Map: Negotiating, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta. LIPI, Yayasan Tifa, dan ____Obor Indonesia.